



Media Title	Kompas		
Head Line	Pintu Tol Hak Kementerian PU		
Date	5 Des 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	25	Article Size	
Journalist	RTS/RAY	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Pintu Tol Hak Kementerian PU

Bangunan Penyebab Kemacetan Akan Dibongkar

JAKARTA, KOMPAS — PT Jasa Marga Tbk tidak keberatan menutup permanen sejumlah pintu Tol Dalam Kota yang memicu kemacetan. Syaratnya langkah ini disetujui Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah Gubernur DKI Jakarta mengajukan usul penutupan sejumlah pintu tol ke Kementerian PU.

"Izin pembuatan akses sesuai regulasi merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, bukan kewenangan pengelola jalan tol seperti kami," kata Direktur Operasi PT Jasa Marga Tbk Hasanudin, Rabu (4/12).

Namun, kata Hasanudin, jika Pintu Tol Semanggi 1 ditutup, beban di Pintu Tol Semanggi 2 sangat berat sehingga pintu tol harus ditambah. Masalahnya, lahannya tidak ada.

Sebenarnya kemacetan arus lalu lintas di dalam kota lebih disebabkan jumlah kendaraan yang melebihi daya tampung jalan. Volume transaksi jasa tol dalam kota sekitar 3,2 juta kendaraan per hari. Sementara suplai jalan yang ada sebetulnya hanya mampu melayani 2,4 juta kendaraan.

"Berarti ada sekitar 800.000 kendaraan transaksi yang *overflow* (uber) dan inilah penyebab utama kemacetan," katanya.

Namun, berdasarkan pantauan, antrian mobil yang hendak masuk ke tol, seperti di Senayan dan Semanggi 1, sering kali menutup arus kendaraan yang melintas di arteri Jalan Gatot Subroto. Akibatnya, arus lalu lintas di sepanjang jalan itu macet luar biasa sehingga bus transjakarta sampai harus keluar jalur.

Sebelumnya, General Manager Tol Cawang Tomang Cengkareng Subakti Sukur menyebutkan, dari hasil kajian tiga tahun lalu, ada tiga pintu tol yang harus

dipindah ke tempat yang lebih layak karena sering menyebabkan kemacetan. Tiga pintu itu adalah Tol Semanggi I, Tebet II, dan Tegal Parang (*Kompas*, 3/12).

Butuh pembebasan lahan

Sementara itu, Corporate Secretary PT Jasa Marga David Wijayatno beralasan, jika penggeseran Pintu Tol Semanggi 1 ke Semanggi 2 membutuhkan pembebasan lahan seberang di area Pintu Tol Semanggi 2 sebagai kompensasi pelebaran.

"Dari 2010 sudah dibahas penggeseran Pintu Tol Semanggi 1 ke Semanggi 2. Semua pihak sudah setuju, tetapi pembebasan lahannya belum terealisasi. Pembebasan lahan ini tugas pemerintah pusat dan DKI," katanya.

Pembebasan lahan diperlukan untuk menampung jumlah kendaraan yang biasanya masuk dari Semanggi 1, kecuali loket di Semanggi 2 ditambah menjadi lima loket. Saat ini rata-rata kendaraan yang masuk ke Pintu Tol Semanggi 1 ada 14.000 kendaraan per hari dan di Semanggi 2 sebanyak 5.000 kendaraan.

David mengungkapkan, pihaknya bersedia mengikuti keinginan pemerintah untuk mengurai kemacetan. Sebab, volume kendaraan yang melintas di jalanan Jakarta sudah cukup tinggi. Di Tol Dalam Kota, misalnya, rata-rata 550.000 kendaraan melintas per hari atau 22.916 ken-

daraan per jam.

Bongkar bangunan

Terkait persoalan kemacetan di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta mulai membongkar bangunan yang memicu kemacetan. Pemerintah siap menghadapi konsekuensi hukum yang muncul pada kemudian hari jika pihak swasta tidak menerima langkah tersebut. Beberapa bangunan sudah dibongkar, berikutnya dilanjutkan di tempat lain.

"Semua yang menyebabkan kemacetan tidak akan kami biarkan. Bangunan di sekitar mal dan gedung yang mengganggu lalu lintas akan kami bongkar," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Setelah membongkar kanopi parkir taksi di depan Hotel Aryaduta, Pemprov DKI akan membongkar kanopi di depan Hotel Shangri-La dan bangunan serupa di sekitar Taman Anggrek.

Pemprov DKI berharap, jika pada akhirnya sampai berperkara ke pengadilan tata usaha negara, pihaknya mendapat dukungan semua pihak, termasuk aparat lembaga peradilan tersebut. Pemprov akan membekali dengan data dan fakta yang akurat.

Secara terpisah, Rabu, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan pengelola Plaza Semanggi bertemu. Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Benhard Hutajulu mengatakan, pertemuan itu membahas rencana pelebaran jalan di sisi Jalan Akri. Lahan sisi Jalan Akri selama ini masih dikuasai pengelola mal.

"Di pertemuan itu, pengelola mal sepakat menyerahkan aset mereka. Awal tahun depan pelebaran jalan alternatif bisa dilakukan," kata Benhard.

(RTS/RAY/MDN/NDY)